

STRATEGI DAN OPTIMALISASI SUMBER DAYA DESA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MANDIRI DAN INKLUSIF DI DESA SUKARAJA KECAMATAN WARUNGGUNUNG KABUPATEN LEBAK

MUARA TORANG HADOMUAN¹, YOHANES OCI², DENI PERMANA³, NUR RIZKA OKTOVIA⁴, DEVI TRIANA⁵

Universitas Pamulang^{1,2,3}

Email: dosen03369@unpam.ac.id¹, dosen10123@unpam.ac.id², dosen03359@unpam.ac.id³, rizkaa.vv@gmail.com⁴, devitrianaa@gmail.com⁵

Abstract: Village development has a strategic role in supporting national economic growth through optimizing local potential. Sukaraja Village, Warunggunung District, Lebak Regency has various resources that have the potential to be developed, but their use is not optimal in improving the welfare of the community. This research aims to analyze the potential of village resources, formulate strategies for village governments and communities in optimizing resources, and examine these optimization efforts in encouraging independent and inclusive economic growth. This PKM aims to analyze strategies and optimize village resources in encouraging independent and inclusive economic growth in Sukaraja Village, Warunggunung District. Village development has a strategic role in national development because villages are the basis of community economic activities supported by the potential of natural resources, human resources, and social capital. However, the utilization of this potential in Sukaraja Village is still not optimal, which is characterized by limited human resource capacity, low market and capital access, and lack of synergy between stakeholders. The method used in this activity is a participatory, educational, and implementive approach through the Community Service (PkM) program. The implementation of activities is carried out in stages including preparation and mapping of partner needs, presentation of materials to strengthen the capacity of village apparatus, development of village information disclosure systems, empowerment of community participation, implementation assistance, and monitoring and evaluation. The results of the activity show that a participatory approach and continuous mentoring are able to increase the understanding of village officials related to transparent and accountable resource management, as well as encourage active community participation in village development.

Keywords: village resources, independent economy, inclusive economy, community empowerment, transparency, PkM

Abstrak: Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi potensi lokal yang dimiliki. Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak memiliki berbagai sumber daya yang berpotensi dikembangkan, namun pemanfaatannya belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sumber daya desa, merumuskan strategi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya, serta mengkaji upaya optimalisasi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan inklusif. PkM ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan optimalisasi sumber daya desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mandiri dan inklusif di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung. Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena desa merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat yang didukung oleh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial. Namun, pemanfaatan potensi tersebut di Desa Sukaraja masih belum optimal, yang ditandai dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya akses pasar dan modal, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif, edukatif, dan implementatif melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap meliputi persiapan dan pemetaan kebutuhan mitra, pemaparan materi penguatan kapasitas aparatur desa, pengembangan sistem keterbukaan informasi desa, pemberdayaan partisipasi masyarakat, pendampingan implementatif, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait tata kelola sumber daya yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata kunci: *sumber daya desa, ekonomi mandiri, ekonomi inklusif, pemberdayaan masyarakat, transparansi, PkM*

A. Pendahuluan

Desa merupakan unit sosial-ekonomi fundamental dalam arsitektur pembangunan nasional Indonesia. Lebih dari sekadar entitas administratif paling dasar, desa adalah ruang hidup bagi mayoritas penduduk Indonesia yang menggantungkan penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya lokal—pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha mikro berbasis komunitas. Dalam perspektif teoritis, desa menyanggah fungsi strategis sebagai basis produksi dan distribusi komoditas ekonomi yang sangat menentukan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2011: 104). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas bagi desa untuk mengelola potensinya secara mandiri. Mekanisme Dana Desa yang mengalir setiap tahun dari pemerintah pusat semakin memperkuat kapasitas fiskal desa dalam mendanai program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2020: 12). Namun di balik kemajuan regulatif dan fiskal tersebut, tantangan implementatif tetap substansial: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya inovasi pengelolaan ekonomi desa, serta terbatasnya akses ke pasar dan permodalan menjadi hambatan yang berulang kali ditemukan dalam studi-studi empiris tentang desa di Indonesia (Adisasmita, 2013: 74; Nurcholis, 2011: 87).

Pertumbuhan ekonomi inklusif sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Ali dan Son (2007: 12) menuntut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan. Dalam konteks pedesaan, inklusivitas ekonomi mensyaratkan bahwa petani kecil, perempuan pelaku usaha rumahan, dan warga termiskin memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, pasar, pengetahuan, dan peluang ekonomi. Mewujudkan kondisi ini memerlukan intervensi terstruktur yang melampaui sekadar pemberian bantuan fisik yakni intervensi yang menyentuh dimensi kapasitas, kelembagaan, dan jaringan (Kartasasmita, 1996: 48). Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, merepresentasikan potret desa dengan potensi sumber daya yang kaya namun kapasitas pengelolaan yang masih terbatas. Lahan pertanian yang subur, sektor perikanan yang belum berkembang optimal, dan modal sosial komunitas yang solid sesungguhnya merupakan aset pembangunan yang sangat berharga, namun pemanfaatannya masih terkendala oleh empat permasalahan utama yang saling berkaitan: (1) pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal akibat penggunaan metode produksi yang masih konvensional; (2) keterbatasan kapasitas SDM dalam kewirausahaan dan manajemen usaha; (3) sempitnya akses terhadap pasar dan sumber permodalan formal; dan (4) lemahnya sinergi kelembagaan antar-pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini hadir sebagai respons terstruktur dan berbasis bukti terhadap permasalahan tersebut, dengan tiga tujuan utama: (1) memetakan dan mendokumentasikan potensi sumber daya Desa Sukaraja secara sistematis; (2) merumuskan dan mengimplementasikan strategi optimalisasi sumber daya yang komprehensif melalui empat pilar intervensi; dan (3) meletakkan fondasi awal bagi tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Metodologi Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tanggal 9–11 April 2026. Peserta kegiatan berjumlah 87 orang yang terdiri atas aparatur desa, kelompok tani, pelaku usaha mikro, kelompok perempuan (PKK), karang taruna, dan tokoh masyarakat mewakili keragaman elemen sosial-ekonomi Desa Sukaraja. Jumlah kehadiran ini melampaui target awal sebesar 30%, yang menunjukkan tingginya relevansi program bagi kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan metodologis yang digunakan mencakup tiga dimensi yang saling melengkapi: (1) partisipatif masyarakat dilibatkan sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan mulai dari pemetaan kebutuhan hingga evaluasi; (2) edukatif transfer pengetahuan dilakukan melalui pelatihan tematik, lokakarya interaktif, dan pendampingan kontekstual; dan (3) implementatif hasil pelatihan diterapkan secara langsung di lapangan dengan asistensi berkelanjutan dari tim PkM. Pendekatan ini didesain berdasarkan prinsip-prinsip Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menekankan pentingnya memulai dari realitas yang dialami komunitas sasaran (Chambers, 1994:

953). Secara operasional, pelaksanaan dibagi ke dalam enam tahapan terpadu sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1.1
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM Desa Sukaraja

No.	Tahapan	Waktu	Metode	Output
1	Persiapan & Pemetaan Kebutuhan	9 April 2026	Koordinasi, observasi lapangan, wawancara, FGD	Data kebutuhan mitra, basis penyesuaian materi
2	Penguatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat	10 April 2026	Ceramah partisipatif, diskusi interaktif	Peningkatan pemahaman tata kelola sumber daya desa
3	Strategi & Optimalisasi Sumber Daya	10 April 2026	Lokakarya, pemetaan partisipatif, diskusi kelompok kecil	Dokumen peta potensi sumber daya desa
4	Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	10 April 2026	Forum dialog terbuka, pemaparan populer	Forum Ekonomi Desa terbentuk; 4 program prioritas disepakati
5	Monitoring, Evaluasi & Keberlanjutan	11 April 2026	Evaluasi partisipatif, forum refleksi dialogis	Rekomendasi perbaikan; rencana tindak lanjut

Sumber: Desain pelaksanaan tim PkM, 2026

Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif (transect walk), wawancara semi-terstruktur dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, focus group discussion (FGD), serta pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta pelatihan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber, dilengkapi dengan analisis komparatif data pre-test dan post-test menggunakan statistik deskriptif sederhana.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Strategi dan Optimalisasi Sumber Daya Desa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Inklusif" dilaksanakan di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak pada tanggal 9 hingga 11 April 2026. Kegiatan dalam satu hari tersebut secara keseluruhan melibatkan perangkat desa, petani, pelaku usaha dan warga masyarakat yang dipandang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam Pembangunan social ekonomi Desa Sukaraja.

Pemetaan dan Dokumentasi Potensi Sumber Daya Desa Sukaraja

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pemetaan atau inventarisir potensi sumber daya Desa Sukaraja secara komprehensif. Dalam proses ini melibatkan aparat desa dan juga warga masyarakat Desa Sukaraja sebagai pelaku utama dan pelaku langsung tentang keberadaan dan kondisi secara actual sumber daya yang ada di desa Sukaraja. Kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai data awal sebagai bahan diskusi pada pelaksanaan PkM. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh tim PkM menunjukkan bahwa Desa Sukaraja memiliki potensi sumber daya yang jauh lebih kaya dibandingkan yang selama ini dikelola mulai dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan yang memiliki nilai ekonomis. Namun realitas yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar lahan tersebut masih ditanami dengan pola monokultur tradisional berbasis padi, yang produktivitasnya relatif rendah dan sangat rentan terhadap fluktuasi iklim. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara potensi agronomis lahan (land capability) dengan produktivitas aktual yang dicapai petani suatu permasalahan klasik yang bersumber dari keterbatasan pengetahuan teknis dan akses terhadap input pertanian berkualitas (Mubyarto, 2004: 35; Arsyad, 2018: 67).

Dalam sektor perikanan maupun peternakan masih terdapat berbagai permasalahan dilapangan. Dalam tatakelola yang dilakukan oleh warga masyarakat masih belum maksimal. Dalam informasi yang didapatkan bahwa sektor perikanan dan peternakan masih belum menjadi hal yang prioritas sehingga dalam produksi sumber daya yang ada tidak berjalan dengan baik. Jenis ikan yang paling umum dibudidayakan warga adalah ikan lele, nila, dan gurame, namun dengan kapasitas produksi yang sangat terbatas akibat penggunaan teknik budidaya yang masih bersifat subsisten. Ketiadaan pengelolaan berbasis data ini menjadi hambatan serius bagi peningkatan produktivitas dan profitabilitas usaha perikanan warga. Di luar sektor primer tersebut, pemetaan juga berhasil menginventarisasi beberapa potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal yang selama ini sama sekali belum tersentuh secara serius. Di antaranya adalah ketersediaan bahan baku bambu yang cukup melimpah di beberapa wilayah desa yang berpotensi dikembangkan menjadi produk kerajinan bernilai tinggi. Data diluar dari sektor primer tersebut dapat dijadikan usaha produk lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan menjadi salah satu pendapatan tambahan warga masyarakat Desa Sukaraja.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha

Sesi pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha merupakan komponen terpanjang dan paling intensif dari seluruh rangkaian kegiatan PkM ini. Pelatihan berlangsung selama satu hari penuh pada tanggal 10 April 2026, diikuti oleh beberapa pelaku usaha mikro yang berasal dari latar belakang usaha yang beragam, mulai dari sektor pertanian dan pengolahan hasil tani, perikanan, kerajinan dan ekonomi kreatif, dan perdagangan kecil (warung). Komposisi ini mencerminkan struktur ekonomi informal Desa Sukaraja yang beragam namun belum terorganisasi secara produktif. Sebelum pelatihan dimulai, tim PkM melakukan pre-test sederhana untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta tentang manajemen usaha dasar. Dari pre-test yang dilakukan pada pelaksanaan PkM bahwa semua dari komposisi yang ada mengaku tidak pernah menyusun rencana usaha secara tertulis, tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha, dan yang terakhir hanya sebgagian kecil yang melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Temuan ini secara empiris mengkonfirmasi kondisi yang selama ini hanya bersifat deskriptif dalam latar belakang kegiatan. Dengan demikian bahwa kelemahan manajerial merupakan hambatan utama perkembangan usaha mikro di Desa Sukaraja, bukan semata-mata keterbatasan modal atau sumber daya (Todaro & Smith, 2018: 231; Rahman & Putri, 2020: 84).

Pelatihan disusun dalam tiga sesi yang saling berkaitan. sesi pertama berfokus pada Literasi Keuangan Usaha, yang mencakup konsep pemisahan keuangan pribadi-usaha, pencatatan transaksi sederhana berbasis buku kas, dan analisis laba-rugi dasar. Peserta tidak sekadar menerima materi secara pasif; mereka diminta mempraktikkan langsung pencatatan transaksi fiktif berbasis kasus yang diambil dari kondisi usaha mereka sendiri. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) semacam ini terbukti lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah dalam mengubah perilaku keuangan pelaku usaha (Kolb, 1984; Rahman & Putri, 2020). Sesi kedua membahas Perencanaan dan Pengembangan Usaha, yang mencakup penyusunan Business Model Canvas (BMC) yang disederhanakan sesuai kapasitas kognitif peserta, identifikasi segmen pelanggan, proposisi nilai produk, serta proyeksi pendapatan jangka pendek. Sesi ketiga membahas Strategi Pemasaran dan Inovasi Produk, dengan penekanan pada pentingnya diferensiasi produk, pengembangan kemasan yang lebih menarik, dan identifikasi segmen pasar baru termasuk pasar digital. Kelompok perempuan pelaku usaha pengolahan pangan menjadi yang paling antusias dalam sesi ini, karena mereka untuk pertama kali mendapatkan pemahaman terstruktur tentang bagaimana menetapkan harga jual yang berbasis pada perhitungan biaya produksi (cost-based pricing), bukan sekadar mengikuti harga tetangga atau perkiraan subjektif. Perubahan perspektif ini sangat fundamental karena praktik penetapan harga yang tidak berbasis perhitungan merupakan salah satu penyebab utama usaha mikro sulit berkembang (Adisasmita, 2013: 104). Setelah sesi ini dilakukan, maka Tim PkM melakukan post-test di akhir sesi pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pemahaman peserta tentang pemisahan keuangan usaha dan pribadi meningkat, kemampuan menyusun rencana usaha dasar meningkat, dan pemahaman tentang strategi penetapan harga berbasis biaya meningkat. Walaupun perubahan sikap dan perilaku nyata baru dapat diukur dalam jangka

menengah, pergeseran kognitif yang terukur dalam pre-test dan post-test ini merupakan indikator awal yang menjanjikan bagi terjadinya transformasi praktik usaha yang berkelanjutan.

Penguatan Akses Pasar dan Jaringan Permodalan

Salah satu kendala paling menghambat perkembangan ekonomi Desa Sukaraja, sebagaimana teridentifikasi dalam analisis situasi, adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap pasar dan sumber permodalan formal. Program PkM ini merancang dua jalur intervensi yang saling melengkapi yang pertama adalah perluasan jaringan pemasaran melalui platform digital, dan fasilitasi akses terhadap skema pembiayaan formal. Dalam jalur pertama, tim PkM memfasilitasi sesi praktik langsung pemasaran digital. Peserta dibimbing secara langsung dalam membuat akun bisnis di platform Instagram dan Facebook, menyusun konten produk yang menarik berbasis foto dan deskripsi singkat, serta memahami mekanisme dasar penjualan melalui WhatsApp Business. Pada akhir sesi diharapkan semua peserta dapat membuat akun usaha aktif dan langsung memposting produk masing-masing di berbagai platform media sosial. Namun demikian, tim PkM menyadari bahwa keberhasilan membuat akun digital saja tidak serta-merta menghasilkan peningkatan penjualan. Diperlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan tentang pengelolaan konten, respons pelanggan, dan manajemen pesanan daring. Oleh karena itu, selain sesi pelatihan langsung, tim PkM juga menyiapkan panduan pemasaran digital berbahasa sederhana yang dapat digunakan peserta sebagai referensi mandiri setelah kegiatan berakhir. Panduan ini disusun secara kolaboratif antara tim PkM dan peserta pelatihan, sehingga isinya benar-benar sesuai dengan kapasitas dan konteks pengguna.

Dalam jalur penguatan akses permodalan, tim PkM melaksanakan sesi edukasi tentang berbagai skema pembiayaan formal yang tersedia bagi pelaku UMKM desa. Materi mencakup pengenalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prosedur dan persyaratan pengajuannya, program bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, serta mekanisme pembiayaan berbasis koperasi simpan pinjam. Dalam sesi ini, peserta mengaku sama sekali belum pernah mengakses skema pembiayaan formal apapun, bukan karena tidak memenuhi syarat, melainkan karena tidak mengetahui keberadaannya. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya edukasi finansial sebagai komponen esensial dalam strategi pemberdayaan ekonomi desa (Nurcholis, 2011: 87; Kementerian Desa PDTT, 2020: 12). Sebagai tindak lanjut konkret, tim PkM mencoba akan membangun komunikasi untuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan kelompok usaha desa dengan kepala unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lebak. Tindak lanjut ini, diharapkan dapat menghasilkan nota kesepahaman antara penyedia permodalan dengan masyarakat agar dapat membantu dalam soal pembiayaan usaha. Selain itu juga, penyampaian pada proses pengajuan peminjaman modal usaha harus disederhanakan mulai dari proses sampai dengan pencairan. Penekanan ini menjadi penting agar warga masyarakat Desa Sukaraja dapat mengakses modal dan dapat mengembangkan usahanya demi terciptanya sirkular ekonomi desa yang inklusif dan mandiri. Maka dengan demikian, perubahan sosial juga akan mempengaruhi dengan meningkatnya ekonomi masyarakat.

Penguatan Sinergi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Dimensi kelembagaan merupakan komponen yang paling sering terabaikan dalam program pemberdayaan ekonomi desa, namun paradoksnya justru merupakan fondasi yang paling menentukan keberlanjutan hasil-hasil pemberdayaan tersebut. Tanpa mekanisme koordinasi kelembagaan yang kuat, peningkatan kapasitas individual yang dihasilkan dari pelatihan dan pendampingan berisiko besar tidak terinstitusionalisasi dan menguap begitu program berakhir. Kesadaran inilah yang mendorong tim PkM untuk menjadikan penguatan sinergi kelembagaan sebagai salah satu komponen strategis dari seluruh rangkaian kegiatan. Sesi pemberdayaan partisipasi masyarakat dirancang sebagai forum dialog terbuka yang memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan pandangan, aspirasi, dan gagasan mereka tentang pembangunan ekonomi desa. Forum ini tidak didesain sebagai ceramah dari tim PkM kepada peserta, melainkan sebagai ruang deliberasi horizontal di mana semua suara dari petani, perempuan pedagang kecil, pemuda karang taruna, hingga aparatur desa memiliki bobot yang setara. Pendekatan deliberatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan inklusivitas dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan publik (Nurcholis, 2011; Kementerian Desa PDTT, 2020).

Dalam forum tersebut, teridentifikasi sejumlah hambatan koordinasi yang selama ini tidak pernah dibahas secara terbuka. Di antaranya adalah minimnya komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok usaha lokal dalam perencanaan program dana desa. Kecenderungan program pelatihan eksternal yang dilakukan secara insidental tanpa kesinambungan dan tindak lanjut serta ketiadaan platform bersama yang memungkinkan pelaku usaha dari sektor berbeda untuk berkolaborasi dan saling mendukung. Identifikasi hambatan-hambatan ini secara kolektif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merancang mekanisme koordinasi yang lebih fungsional.

D. Penutup

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Strategi dan Optimalisasi Sumber Daya Desa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Inklusif di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak" yang dilaksanakan pada 9–11 April 2026 telah berhasil mencapai seluruh tujuan yang telah ditetapkan, bahkan melampaui beberapa target yang direncanakan. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan, tiga simpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, Desa Sukaraja memiliki potensi sumber daya yang kaya dan beragam mencakup lahan pertanian, perikanan yang berpotensi dikembangkan secara semi-intensif, serta modal sosial komunitas yang kuat dalam bentuk gotong royong dan kelompok-kelompok usaha yang telah terbentuk. Melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan bersama masyarakat, potensi-potensi ini kini telah terdokumentasikan secara sistematis.

Kedua, strategi intervensi yang dikembangkan melalui empat pilar optimalisasi sumber daya alam, peningkatan kapasitas SDM, penguatan akses pasar dan modal, serta pembangunan sinergi kelembagaan. Pelatihan kewirausahaan yang diikuti pelaku usaha menghasilkan rata-rata peningkatan pemahaman, pelaku usaha mampu membuat akun pemasaran digital aktif, dan juga pelaku usaha mendapatkan pemahaman tentang mendapatkan permodalan untuk mengembangkan usaha. Keseluruhan capaian ini mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif, edukatif, dan implementatif yang diterapkan dalam program PkM ini merupakan pendekatan yang tepat dan kontekstual untuk kondisi Desa Sukaraja. Ketiga, kegiatan PkM ini telah berhasil meletakkan fondasi awal bagi tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Desa Sukaraja. Kelompok-kelompok yang selama ini tersisih dari arus utama ekonomi desa termasuk perempuan pelaku usaha rumahan, pemuda, dan petani kecil mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, jaringan, dan mekanisme koordinasi yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Walaupun transformasi ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dari tiga hari kegiatan PkM, fondasi kelembagaan, pengetahuan, dan jaringan yang dibangun dalam kegiatan ini menyediakan titik berangkat yang kokoh bagi proses transformasi tersebut. PkM ini memberikan dampak yang nyata dan langsung terasa. Kelompok petani menyatakan bahwa pemahaman mereka tentang teknik pertanian modern dan pengelolaan lahan meningkat signifikan. Pelaku usaha mikro mengaku mendapatkan wawasan baru tentang manajemen keuangan dan strategi pemasaran yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari secara terstruktur.

Daftar Pustaka

- Abdiyanto. 2024. "Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Aparatur Desa." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. *Asian Development Review*, 24(1), 11–31.
- Arsyad, L. (2018). *Ekonomi pembangunan (Edisi 5)*. UPP STIM YKPN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Evaluasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2020. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.

- Mubyarto. 2004. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sutopo, Dhanny Septimawan. 2023. "Memahami Pembangunan Desa dan Perspektifnya." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2011. *Economic Development*. New York: Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.